

# POLICY BRIEF

## Ditujukan Kepada:

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Kementerian Ketenagakerjaan  
Kementerian Keuangan

## Disusun Oleh:

**Fajar Lingga Prasetya, S.AB**

(Analisis Kebijakan Ahli Pertama Pusjar SKMP)

**Muhammad Rizal A, S.A.P**

(Peserta Magang SIAPKERJA Kemenaker)

**EDISI  
FEBRUARI  
2026**

# “Transformasi UMKM untuk Penciptaan Kerja Formal Berkualitas”

Sesuai Astacita ke-3

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,  
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur



# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Pasar kerja Indonesia menunjukkan pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen atau setara dengan 7,46 juta orang. Meski menurun secara tahunan, kenaikan dibandingkan Februari 2025 mengindikasikan tekanan baru di pasar kerja. Dominasi sektor informal yang masih mencapai 57,80 persen tenaga kerja nasional serta tingginya pengangguran lulusan baru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan pekerjaan formal berkualitas secara berkelanjutan.

Permasalahan ketenagakerjaan Indonesia bersifat struktural dan saling terkait. Data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan sekitar 2,7 juta warga putus asa mencari kerja pada 2024, meningkat signifikan dibandingkan 2019 yang hanya sekitar 883.000 orang. Fenomena ini mencerminkan lemahnya penyerapan tenaga kerja formal, khususnya bagi generasi muda. Di sisi lain, UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional masih didominasi usaha informal dengan legalitas rendah, keterbatasan akses pembiayaan, serta lemahnya keterhubungan dengan pasar dan rantai pasok formal, sehingga belum optimal menciptakan lapangan kerja formal.

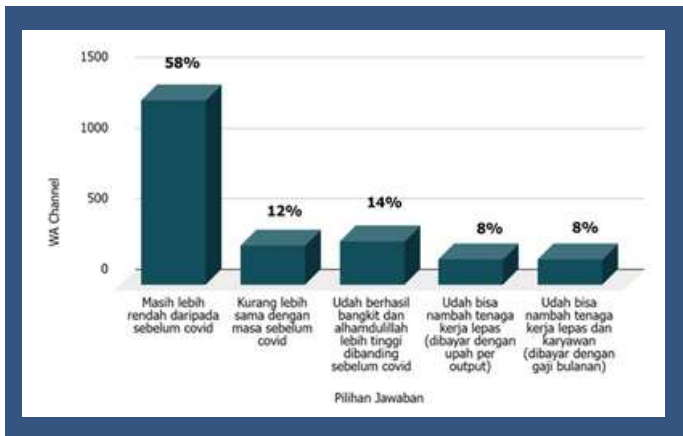
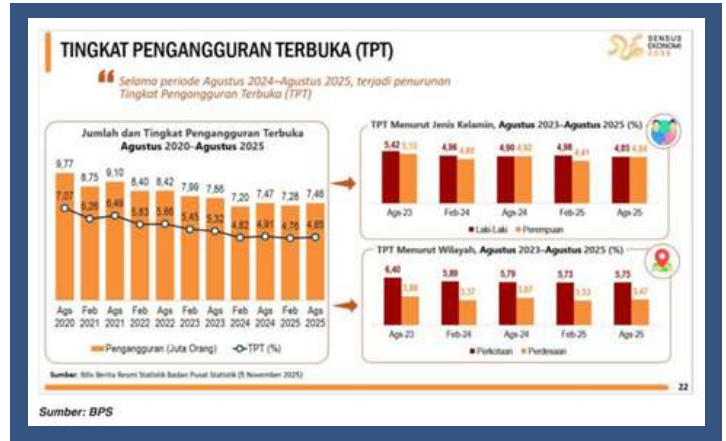
Merespons permasalahan tersebut, policy brief ini mengajukan beberapa alternatif kebijakan, yakni akselerasi formalisasi UMKM melalui simplifikasi perizinan dan insentif, penguatan kapasitas SDM UMKM melalui peningkatan keterampilan manajerial, literasi keuangan, dan digitalisasi, pengembangan kluster UMKM berbasis sektor unggulan daerah yang terintegrasi dengan rantai pasok industri, optimalisasi dana publik dan pembiayaan perbankan berbasis kinerja UMKM, serta integrasi kebijakan UMKM dan ketenagakerjaan untuk penyerapan tenaga kerja muda.

Dari berbagai alternatif tersebut, rekomendasi yang diajukan adalah transformasi UMKM berbasis ekosistem terintegrasi untuk penciptaan lapangan kerja formal. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjawab persoalan struktural UMKM dan ketenagakerjaan secara simultan melalui formalisasi usaha, peningkatan kapasitas SDM, perluasan akses pembiayaan dan pasar, integrasi ke rantai pasok industri, serta pemanfaatan dana publik berbasis hasil. Dengan ekosistem yang terintegrasi, UMKM diharapkan dapat naik kelas secara berkelanjutan dan berperan sebagai motor utama penciptaan lapangan kerja formal berkualitas, khususnya bagi tenaga kerja muda, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

# PENDAHULUAN

Pasar kerja Indonesia menunjukkan sinyal pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen atau setara dengan 7,46 juta orang. Angka ini menurun dibandingkan Agustus 2024 (4,91 persen) namun meningkat dibandingkan Februari 2025 (4,76 persen), menandakan tekanan baru di pasar tenaga kerja.

Tekanan ini terutama disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan, sementara dominasi sektor informal masih kuat dengan 57,80 persen tenaga kerja nasional.



Fenomena hopeless job seekers mempertegas persoalan struktural pasar tenaga kerja. Data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa sekitar 2,7 juta warga Indonesia telah putus asa mencari kerja pada 2024, meningkat tajam dari 883 ribu pada 2019, menunjukkan kegagalan sistem ketenagakerjaan dalam menyerap tenaga kerja secara formal.

Di tengah dinamika ini, sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional juga menghadapi hambatan signifikan. Hasil polling UKMIndonesia.id yang dilakukan pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa meskipun hampir tiga tahun setelah pandemi, sebagian besar pelaku UMKM (58 persen dari 2.273 responden) menyatakan omzet mereka **masih lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi**. Hambatan biaya produksi yang tinggi, penurunan daya beli konsumen, serta beban biaya tetap seperti pajak dan bahan baku masih menjadi tantangan utama.

Selain itu, survei Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tahun 2025 yang dilansir oleh linkumkm.id tanggal 24 Agustus 2025 mengidentifikasi tiga kelemahan struktural yang masih membayangi UMKM: keterbatasan kompetensi terutama dalam penyusunan laporan keuangan (sekitar 74 persen UMKM belum mampu membuat laporan yang baik),

jaringan pasar yang sempit yang masih terbatas pada wilayah lokal, serta keterbatasan modal yang jauh di bawah standar modal UMKM di negara maju. Hambatan-hambatan ini mengakibatkan banyak UMKM sulit mengakses pembiayaan formal dan belum terintegrasi dalam rantai distribusi yang lebih luas.

Kondisi yang terfragmentasi ini menghambat kemampuan UMKM untuk tumbuh menjadi pencipta pekerjaan formal berkualitas. Hingga saat ini, permasalahan seperti informalitas usaha, keterbatasan kemampuan digital dan pasar, serta struktur biaya yang masih berat menjadi faktor penghambat utama. Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi mikro jauh lebih lambat dan masih jauh dari kata tuntas, meskipun indikator makro terlihat relatif stabil.

# DESKRIPSI MASALAH

## 1. Dominasi Informalitas UMKM dan Rendahnya Akses terhadap Ekonomi Formal

Dilansir dari detik.com, artikel "Langkah Awal agar UMKM Naik kelas, urus Legalitas usahamu Sekarang!" tanggal 4 Juli 2025, sebagian besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih beroperasi secara informal dan belum memiliki legalitas usaha yang memadai, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, maupun badan hukum. Rendahnya tingkat legalitas ini dipengaruhi oleh persepsi pelaku UMKM bahwa proses formalisasi usaha dianggap rumit dan belum memberikan manfaat langsung bagi keberlangsungan usaha. Akibatnya, UMKM menghadapi keterbatasan dalam mengakses pembiayaan perbankan, program pemerintah, serta peluang kemitraan dengan dunia usaha dan industri besar. Kondisi informalitas tersebut juga menghambat integrasi UMKM ke dalam rantai pasok formal dan ekonomi digital, sekaligus membatasi kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja formal yang terlindungi dan berkelanjutan



## 2. Keterbatasan Kompetensi SDM UMKM, Khususnya dalam Manajemen Keuangan

Kapasitas sumber daya manusia UMKM masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha. Sekitar 74 persen pelaku UMKM belum mampu menyusun laporan keuangan secara memadai, sehingga dinilai tidak memenuhi kriteria pembiayaan lembaga keuangan. Lemahnya literasi keuangan ini menghambat UMKM untuk mengakses kredit produktif, memperluas skala usaha, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

# DESKRIPSI MASALAH

### **3. Keterbatasan Modal dan Skala Usaha yang Menghambat Daya Saing**

Modal usaha UMKM Indonesia relatif kecil dibandingkan UMKM di negara maju. Keterbatasan permodalan ini membuat UMKM sulit berinvestasi pada teknologi, peningkatan kualitas produk, dan perekrutan tenaga kerja formal. Akibatnya, sebagian besar UMKM bertahan pada skala mikro dengan produktivitas rendah dan kontribusi terbatas terhadap penciptaan lapangan kerja formal.

### **4. Jaringan Pasar yang Sempit dan Ketergantungan pada Pasar Lokal**

Dilansir dari linkumkm.id lebih dari 50 persen UMKM masih beroperasi dalam lingkup pasar yang terbatas dan bersifat lokal. Keterbatasan akses pasar, rendahnya pemanfaatan digitalisasi, serta minimnya integrasi ke pasar nasional dan global membatasi potensi ekspansi usaha. Kondisi ini berdampak langsung pada stagnasi omzet dan rendahnya kemampuan UMKM untuk menyerap tenaga kerja tambahan.

### **5. Tekanan Biaya Produksi dan Melemahnya Daya Beli Masyarakat**

Pelaku UMKM menghadapi tekanan kenaikan biaya bahan baku, ongkos distribusi, dan biaya operasional lainnya, di tengah penurunan daya beli konsumen. Tekanan ganda ini menghambat perputaran modal dan menekan margin keuntungan, sehingga UMKM enggan melakukan investasi baru maupun merekrut tenaga kerja formal.

### **6. Kesenjangan antara Pasar Tenaga Kerja dan Kebutuhan Dunia Usaha**

Pasar kerja formal belum mampu menyerap angkatan kerja baru secara optimal, khususnya lulusan muda. Ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri mendorong sebagian tenaga kerja masuk ke sektor UMKM informal atau bahkan menjadi penganggur terselubung. Tanpa intervensi kebijakan yang menghubungkan peningkatan kapasitas UMKM dengan pengembangan keterampilan tenaga kerja, potensi penyerapan tenaga kerja formal akan terus terbatas.

### **7. Lemahnya Integrasi Ekosistem Pendukung UMKM dan Ketenagakerjaan**

Program pengembangan UMKM masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. Pendampingan, inkubasi usaha, dan kemitraan dengan industri besar belum dirancang sebagai satu kesatuan strategi penciptaan lapangan kerja formal. Akibatnya, berbagai intervensi kebijakan tidak menghasilkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas usaha dan penyerapan tenaga kerja.

### **8. Belum Optimalnya Pemanfaatan Dana Publik dan Likuiditas Perbankan**

Di tengah keterbatasan lapangan kerja formal, terdapat likuiditas perbankan dan dana publik yang relatif besar namun belum dimanfaatkan secara strategis. Dana tersebut belum diarahkan secara efektif untuk mendukung pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, transformasi UMKM menuju usaha formal dan produktif, serta pengembangan usaha yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja

# ALTERNATIF KEBIJAKAN

## **1. Akselerasi Formalisasi UMKM melalui Simplifikasi Regulasi dan Insentif**

Formalisasi UMKM perlu didorong melalui penyederhanaan perizinan usaha dan pemberian insentif yang jelas serta mudah diakses. Proses legalitas seperti NIB, perizinan dasar, dan administrasi perpajakan perlu semakin terintegrasi dan ramah UMKM. Insentif berupa kemudahan akses pembiayaan, prioritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta keringanan pajak pada fase awal usaha dapat menjadi daya tarik utama bagi UMKM untuk masuk ke sektor formal. Pendekatan ini bertujuan memperluas basis UMKM legal tanpa menambah beban administratif yang berlebihan.

## **2. Penguatan Kapasitas SDM UMKM melalui Skilling yang Terhubung dengan Pembiayaan**

Rendahnya kompetensi manajerial dan literasi keuangan UMKM perlu diatasi melalui program peningkatan kapasitas yang terstruktur dan aplikatif. Pelatihan manajemen usaha, penyusunan laporan keuangan, dan keterampilan digital sebaiknya dikaitkan langsung dengan akses pembiayaan. UMKM yang telah mengikuti dan lulus pelatihan diberikan prioritas untuk mengakses kredit perbankan atau pembiayaan berbunga rendah. Pendekatan ini memastikan bahwa peningkatan kapasitas SDM berdampak nyata pada peningkatan produktivitas dan perluasan usaha.

## **3. Pengembangan Klaster UMKM yang Terintegrasi dengan Rantai Pasok Industri**

UMKM perlu diarahkan masuk ke dalam klaster usaha berbasis sektor unggulan daerah yang terhubung dengan industri besar, BUMN, dan proyek strategis. Melalui kemitraan yang jelas, UMKM memperoleh kepastian pasar, peningkatan kualitas produk, serta transfer pengetahuan dan teknologi. Integrasi ke dalam rantai pasok industri akan mendorong UMKM naik kelas, memperbesar skala usaha, dan membuka ruang yang lebih luas untuk penyerapan tenaga kerja formal.

## **4. Optimalisasi Dana Publik dan Likuiditas Perbankan untuk UMKM Berorientasi Job Creation**

Likuiditas perbankan dan dana publik yang masih mengendap perlu diarahkan secara lebih produktif untuk mendukung UMKM yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Skema pembiayaan dapat dirancang dengan insentif berbasis kinerja, di mana UMKM yang mampu menunjukkan peningkatan omzet, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja formal memperoleh akses pembiayaan yang lebih besar dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan pembiayaan sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar penyaluran kredit.

## 5. Integrasi Kebijakan UMKM dan Ketenagakerjaan untuk Penyerapan Tenaga Kerja Muda

UMKM perlu diposisikan sebagai aktor utama dalam penyerapan tenaga kerja, khususnya lulusan muda. Kebijakan UMKM dan ketenagakerjaan perlu diintegrasikan melalui skema pelatihan berbasis kebutuhan pasar, insentif perekrutan tenaga kerja, dan pendampingan usaha. Dengan pendekatan ini, UMKM tidak hanya menjadi sarana bertahan hidup, tetapi berkembang menjadi penyedia lapangan kerja formal yang layak dan berkelanjutan di tingkat lokal.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi kebijakan yang paling tepat dipilih **Transformasi UMKM Berbasis Ekosistem Terintegrasi untuk Penciptaan Lapangan Kerja Formal**, karena rekomendasi ini paling mampu menjawab persoalan UMKM dan ketenagakerjaan secara menyeluruh. Transformasi UMKM tidak cukup dilakukan melalui formalisasi atau pembiayaan semata, tetapi harus dibangun melalui ekosistem yang mengintegrasikan peningkatan kapasitas SDM, akses pasar, pembiayaan produktif, dan penciptaan lapangan kerja formal.

Pendekatan ini menempatkan formalisasi UMKM sebagai proses bertahap yang didorong oleh insentif, bukan kewajiban administratif. Peningkatan kompetensi SDM UMKM dan tenaga kerja dilakukan secara simultan dengan pembukaan akses pembiayaan dan pasar. UMKM diarahkan masuk ke dalam klaster usaha dan rantai pasok industri agar mampu meningkatkan skala dan produktivitas. Pada saat yang sama, dana publik dan likuiditas perbankan dimanfaatkan secara berbasis hasil, dengan indikator utama berupa penciptaan lapangan kerja formal.

Melalui rekomendasi ini, UMKM diharapkan tidak hanya pulih dari tekanan pascapandemi, tetapi juga bertransformasi menjadi pilar utama penciptaan lapangan kerja formal, penurunan pengangguran, dan penguatan struktur ekonomi nasional.

# REFERENSI

---

Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

CNBC Indonesia. (2025). Data BRIN: 2,7 Juta Warga RI Sudah Putus Asa Cari Kerja. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251222093611-4-696181/databrin-27-juta-warga-ri-sudah-putus-asa-cari-kerja>

LinkUMKM. (2024). Tiga Kelemahan Utama yang Masih Membayangi UMKM Indonesia. Diakses dari <https://linkumkm.id/news/detail/16675/3-kelemahan-utama-yang-masihmembayangi-umkm-indonesia>

LinkUMKM (2025). Diakses dari : <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsiposts/pemerintah-perlu-tahu-sudah-2025-kondisi-bisnis-umkm-belum-pulih-daridampak-pandemi-covid>

<https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-8117024/tantangan-anak-muda-bangun-umkm-naik-kelas-di-indonesia/amp>

